



**SALINAN**

WALI KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET  
UNTUK PEMASANGAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Retribusi Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET UNTUK PEMASANGAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli

Daerah...

Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub Pendapatan Asli Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perorangan adalah Warga Negara Indonesia.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Reklame insidental adalah reklame yang masa pajaknya ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan atau 1 (satu) kali penyelenggaraan.

11. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai faktor dalam penghitungan Pajak Reklame terutang.
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu penyelenggaraan reklame.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke kas Daerah atau kepada tempat lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak

karena...

karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa Pajak atau dalam bagian tahun Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

28. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
29. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
31. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau STPD.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Keringanan Pajak Daerah adalah tata cara pemberian penundaan pembayaran pajak daerah dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
34. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
35. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
36. Reklame Media Luar adalah reklame yang dipasang, ditempelkan atau digantungkan pada bangunan, halaman, dan diatas bangunan yang melebihi dari batas tanah kepemilikan, yang meliputi reklame

papan/*billboard*, *call brete*, megatron, videotron, *electronic display*, dan reklame insidental.

37. Titik strategis adalah suatu titik lokasi yang mempunyai nilai jual tertentu berdasarkan lokasi, luas tanah, waktu pemakaian dan peruntukannya.
38. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
39. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
40. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Retribusi Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar yang selanjutnya disebut retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame adalah bagian dari retribusi pemakaian kekayaan daerah termasuk diatas permukaan tanah untuk pemasangan sarana reklame media luar.
42. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan retribusi.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
44. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan...

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

45. Pemungutan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 2

Setiap penyelenggaraan reklame dipungut pajak dengan nama Pajak Reklame.

Pasal...

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*;
  - b. Reklame *videotron/megatron/large electronic display* (LED);
  - c. Reklame kain;
  - d. Reklame melekat (*stiker*);
  - e. Reklame berjalan (*mobile*);
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/slide;
  - i. Reklame peragaan; dan
  - j. Reklame lainnya.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit; nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan luas bidang reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) dan/atau
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan

e. Reklame...

- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak, serta Wilayah Pemungutan

#### Paragraf 1

#### Dasar Pengenaan

#### Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
  - a. Jenis reklame;
  - b. bahan yang digunakan;
  - c. lokasi penempatan;
  - d. jangka waktu penayangan;
  - e. jangka waktu penyelenggaraan;
  - f. jumlah reklame; dan
  - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan

menggunakan...

menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Zona jalan untuk pemasangan reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Penggantian konten reklame dengan mengubah merek/judul reklame terdahulu yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.
- (8) Dalam hal pemakaian reklame di tanah negara pada masa pengelolaan titik reklame yang tidak genap setahun, maka pajak reklame baru dibatasi sampai dengan sisa periode pengelolaan titik reklame dengan perhitungan pajak hanya selama masa sisa pemakaian reklame di tanah negara.
- (9) Permohonan izin reklame diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan.
- (10) Masa Pajak Tahunan ditetapkan selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

Ketentuan lain mengenai NSR adalah sebagai berikut:

- a. NSR untuk reklame rokok dikenakan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. NSR untuk reklame lebih dari 1 (satu) muka atau reklame dengan sisi tampilan lebih dari 1 (satu), setiap tambahan sisi tampilan dikenakan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen).

#### Paragraf 2

#### Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 7

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

### Pasal 8

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan nilai kontrak reklame dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

### Paragraf 3

#### Wilayah Pemungutan

### Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (2) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran dan Pendataan Pajak Reklame

### Paragraf 1

#### Pendaftaran Pajak Reklame

### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek Pajak kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat pendaftaran Objek Pajak.
- (2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menggunakan sistem berbasis elektronik.
- (2) Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui sistem *online* apabila memiliki objek pajak baru dengan mengisi formulir pendaftaran secara benar, jelas dan lengkap serta serta dilampiri berkas pendukung pengajuan yang diunggah melalui situs *web online* pajak yang terdiri dari:
  - a. scan asli Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku untuk Wajib Pajak perorangan dan atau kuasa/perwakilan dari Wajib Pajak badan usaha;
  - b. scan asli akte pendirian untuk Wajib Pajak badan usaha;
  - c. scan asli surat kuasa atau penunjukan dari Wajib Pajak badan usaha kepada perwakilan Wajib Pajak;
  - d. denah lokasi;
  - e. foto lokasi reklame;
  - f. desain dan tipologi reklame;
  - g. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggungjawab struktur/konstruksi dalam hal penyelenggaraan reklame menggunakan konstruksi;
  - h. Persetujuan Bangunan Gedung atau bukti pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung atau Sertifikat Laik Fungsi dalam hal penyelenggaraan reklame dengan ukuran lebih dari 3x5 (tiga kali lima) meter;
  - i. pernyataan kebenaran dokumen yang diunggah;
  - j. pernyataan kesediaan melakukan pembongkaran atau menurunkan sendiri reklame apabila 7 (tujuh) hari setelah masa pajak reklame berakhir atau tidak diperpanjang masa izinnnya; dan
  - k. khusus dalam hal pemohon bekerja sama dengan pihak ketiga, maka harus melampirkan kontrak kerja sama yang didalamnya mengandung nilai kontrak.
- (3) Formulir pendaftaran Wajib Pajak dan surat pendaftaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperoleh Wajib Pajak secara *online*.

(4) Kepala...

- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendataan dan menerbitkan surat pengukuhan dan NPWPD secara jabatan dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penyelenggaraan reklame.

## Paragraf 2

### Pendataan Pajak Reklame

#### Pasal 12

- (1) Untuk mengetahui data Objek Pajak Reklame dilakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. massal; dan/atau
  - b. individual.
- (3) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan diinput dalam sistem pajak *online*.

## Bagian Keempat

### Penetapan Besaran Pajak Terutang

#### Pasal 13

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan surat pendaftaran Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Wali Kota secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau perpanjangan penyelenggaraan reklame.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame tahunan yang tidak mendaftar ulang paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa

pajak habis, akan diterbitkan SKPD secara jabatan oleh Wali Kota.

#### Pasal 14

- (1) Besarnya Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Dasar pengenaan Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota meliputi NSR untuk Pajak Reklame.

#### Bagian Kelima

##### Pembayaran dan Penyetoran Pajak Reklame

#### Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal ditetapkannya SKPD.
- (2) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak melalui bank atau aplikasi pembayaran *online*.
- (4) Bukti pembayaran pajak berupa SSPD dan/atau bukti pembayaran *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti bayar yang sah.

#### Bagian Keenam

##### Pengurangan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame

#### Pasal 16

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Wali Kota dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan

ketentuan...

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Wali Kota dapat:
  - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
  - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

#### Paragraf 1

#### Pengurangan Pajak Reklame

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota berwenang memberikan pengurangan Pajak.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pemberian kewenangan pengurangan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak dengan besarnya sama dengan atau lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan permohonan pengurangan pajak yang tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Wali Kota berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Wajib Pajak.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat memberikan pengurangan pajak atau pengurangan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Pajak yang terutang.
- (5) Pengurangan pajak dapat diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal:
  - a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak; atau
  - b. untuk kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah.
- (6) Pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk:
  - a. Wajib Pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas keuangan sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak, diberikan pengurangan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  - b. pemasangan reklame untuk kepentingan sosial, tetapi disertai dengan iklan komersial diberikan pengurangan pajak paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - c. perubahan...

- c. perubahan NSR sehingga berakibat kenaikan ketetapan Pajak Reklame, diberikan pengurangan pajak paling banyak 10% (sepuluh persen); dan/atau
  - d. kepentingan daerah terkait dengan program investasi dan promosi daerah, diberikan pengurangan paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (7) Pengajuan permohonan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem pajak *online* dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
- a. Isian formulir;
  - b. scan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. SKPD dan/atau STPD; dan
  - d. bukti dukung terhadap alasan yang diajukan.
- (8) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali pada masa pajak yang sama.
- (9) Pengajuan permohonan pengurangan pajak dan/atau pengurangan atau penghapusan sanksi administratif menggunakan formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 19

Permohonan pengurangan pajak atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), hanya dapat dilakukan dalam hal:

- a. tidak mengajukan keberatan;
- b. mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
- c. mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak atas Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan/atau STPD.
- (2) Pajak terutang yang tercantum dalam SKPD dan/atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pokok pajak; dan
  - b. sanksi administratif berupa denda.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

Paragraf 2

Pembetulan Pajak Reklame

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan terhadap Pajak Reklame yang telah ditetapkan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil verifikasi di lapangan.

Paragraf 3

Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat membatalkan ketetapan pajak dalam hal permohonan pembatalan ketetapan pajak reklame dari Wajib Pajak.
- (2) Pengajuan pembatalan ketetapan Pajak Reklame dilakukan melalui sistem pajak *online* dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
  - a. isian formulir;
  - b. scan Kartu Tanda Penduduk;
  - c. SKPD dan/atau STPD; dan
  - d. foto kondisi sebelum dan sesudah penurunan reklame.

- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan hasil verifikasi di lapangan.

#### Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah dapat membatalkan ketetapan Pajak Reklame dalam hal kondisi *force majeure* yang menyebabkan reklame musnah seluruhnya maupun sebagian.

#### Pasal 24

- (1) Kondisi *force majeure* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 adalah keadaan yang menyebabkan rusak atau bahkan robohnya reklame sebelum masa pajak berakhir.
- (2) Kondisi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Bencana alam dan bencana non alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara; atau
  - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Jika reklame hanya sebagian musnah, Wajib Pajak dapat meminta pengurangan Pajak Reklame.
- (4) Dalam keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak tidak berhak meminta ganti rugi.

#### Pasal 25

Kondisi adanya keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah yang menjadi dasar pembatalan ketetapan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (2) huruf d adalah:

- a. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- c. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Bagian Ketujuh  
Pemeriksaan Pajak

Pasal 26

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedelapan  
Penagihan Pajak

Paragraf 1  
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Wali Kota dapat menerbitkan STPD untuk Pajak Reklame dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

#### Pasal 28

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Kedaluwarsa Penagihan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan

kesadarannya...

kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

### Paragraf 3

#### Penagihan Piutang Pajak

#### Pasal 30

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Kesembilan

#### Keberatan Pajak Reklame

#### Pasal 31

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memproses pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau Pemungutan.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana

dimaksud...

dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.

- (6) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (8) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.
- (4) Keputusan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah...

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Kepala Perangkat Daerah atas nama Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Wali Kota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal Pajak Reklame yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (8) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berdasarkan hasil penelitian kantor, dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

Bagian Kesepuluh  
Gugatan Pajak Reklame

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 35

Setiap pemasangan sarana reklame media luar dipungut retribusi dengan nama retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame.

Pasal 36

- (1) Objek retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame adalah semua pemasangan reklame media luar yang memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah media layanan masyarakat yang tidak bertujuan komersial.

Pasal 37

- (1) Subjek retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha milik pemerintah daerah untuk reklame.
- (2) Wajib Retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Retribusi

Paragraf 1

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Retribusi

Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame Media

Luar Pada Titik Strategis

Pasal 38

- (1) Titik strategis aset untuk pemasangan reklame media luar ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dasar pengenaan retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame media luar pada titik strategis adalah:
  - a. Lokasi pada zona jalan;

b. nilai...

- b. nilai strategis;
  - c. jangka waktu pengelolaan; dan
  - d. muka reklame.
- (3) Untuk objek yang tidak termasuk kategori zona jalan A dan B, dikenakan tarif paling rendah.

#### Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Retribusi Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame Media Luar Pada Titik Non Strategis

#### Pasal 39

- (1) Retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame media luar pada titik non strategis terbagi atas:
- a. reklame tahunan; dan
  - b. reklame insidental.
- (2) Dasar pengenaan retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame media luar pada titik non strategis untuk reklame tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tarif retribusi dikalikan ukuran dikalikan jumlah.
- (3) Masa retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama dengan masa pajak reklame.
- (4) Dasar pengenaan retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame media luar pada titik non strategis untuk reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah tarif retribusi dikalikan ukuran dikalikan jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (5) Untuk objek yang tidak termasuk kategori zona jalan A, B, dan C, dikenakan tarif terendah.

#### Pasal 40

Zona jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dan Pasal 39 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 41

- (1) Retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame media luar dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pengisian, Penerbitan, dan Penyampaian SKRD

Pasal 42

- (1) SKRD diterbitkan berdasarkan perhitungan nilai retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 ayat (2).
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam menerbitkan SKRD, Kepala Perangkat Daerah mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemungutan retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame.
- (4) SKRD diberikan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Kelima  
Penentuan Pembayaran dan Tempat Pembayaran  
Retribusi Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame

Pasal 43

- (1) Pembayaran Retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame dilakukan secara non tunai sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame dilakukan oleh wajib retribusi melalui bank atau aplikasi pembayaran *online*.

- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame terutang yang tertera pada SKRD adalah 7 (tujuh) hari kalender dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (4) Pembayaran Retribusi pemanfaatan aset untuk pemasangan reklame yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) dengan diterbitkannya STRD untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya retribusi.

#### Bagian Keenam

#### Pembatalan Ketetapan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Retribusi Pemanfaatan Aset untuk Pemasangan Reklame

##### Pasal 44

- (1) Kepala Perangkat Daerah atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya dapat membatalkan Ketetapan Retribusi serta mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Sanksi administratif yang dapat dikurangkan atau dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sanksi administratif yang tercantum dalam STRD.
- (3) Permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Retribusi 1 (satu) kali.

##### Pasal 45

- (1) Permohonan untuk memperoleh pembatalan ketetapan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), hanya dapat dilakukan Wajib Retribusi dalam hal:
  - a. tidak mengajukan keberatan;

b. mengajukan...

- b. mengajukan keberatan, tetapi kemudian mencabut pengajuan keberatan tersebut; atau
  - c. mengajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan mengajukan keberatan.
- (2) Permohonan untuk memperoleh pembatalan ketetapan retribusi dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKRD;
  - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. permohonan harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SKRD, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
  - d. melampirkan dokumen:
    - 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon; dan
    - 2. SKRD.
  - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 46

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat Kepala Perangkat Daerah tidak

memberi....

memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi dianggap dikabulkan dan harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan.

#### Pasal 47

- (1) Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi dapat meminta secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Perangkat Daerah harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan berdasarkan:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 22.1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 77); dan
- b. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pemasangan Sarana Reklame Media Luar (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 21);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 01 Februari 2024  
WALI KOTA SURAKARTA,  
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 01 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,  
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET  
BERUPA PEMAKAIAN TANAH UNTUK  
PEMASANGAN REKLAME

**ZONA JALAN**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
1	JL.ADI SUCIPTO	BANJARSARI	MANAHAN	A
2	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	JAJAR	A
3	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	KARANGASEM	A
4	JL.ADI SUCIPTO	LAWEYAN	KERTEN	A
5	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	GILINGAN	A
6	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	MANAHAN	A
7	JL.AHMAD YANI	BANJARSARI	SUMBER	A
8	JL.AHMAD YANI	JEBRES	TEGALHARJO	A
9	JL.AHMAD YANI	LAWEYAN	KERTEN	A
10	JL.IR.SUTAMI	JEBRES	JEBRES	A
11	JL.IR.SUTAMI	JEBRES	PUCANGSAWIT	A
12	JL.JENDRAL SUDIRMAN	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	A
13	JL.JENDRAL SUDIRMAN	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	A
14	JL.KOL.SUTARTO	JEBRES	JEBRES	A
15	JL.SLAMET RIYADI	BANJARSARI	KEPRABON	A
16	JL.SLAMET RIYADI	BANJARSARI	TIMURAN	A
17	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	JAJAR	A
18	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	KARANGASEM	A
19	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	KERTEN	A
20	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	PAJANG	A
21	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	PENUMPING	A
22	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	PURWOSARI	A
23	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	SONDAKAN	A
24	JL.SLAMET RIYADI	LAWEYAN	SRIWEDARI	A
25	JL.SLAMET RIYADI	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	A
26	JL.SLAMET RIYADI	PASARKLIWON	KAUMAN	A
27	JL.SLAMET RIYADI	SERENGAN	KEMLAYAN	A
28	JL.URIP SUMOHARJO	JEBRES	JEBRES	A
29	JL.URIP SUMOHARJO	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	A
30	JL.URIP SUMOHARJO	JEBRES	PURWODININGRATAN	A

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
31	JL.URIP SUMOHARJO	JEBRES	SUDIROPRAJAN	A
32	JL.URIP SUMOHARJO	JEBRES	TEGALHARJO	A
33	KOMP.PSR AYAM	PASARKLIWON	SEMANGGI	A
34	KOMP.PSR AYU BALAPAN	BANJARSARI	KESTALAN	A
35	KOMP.PSR BAMBU	BANJARSARI	NUSUKAN	A
36	KOMP.PSR BANGUNHARJO	BANJARSARI	MANAHAN	A
37	KOMP.PSR BESI TUA	PASARKLIWON	SEMANGGI	A
38	KOMP.PSR BUAH JURUG	JEBRES	JEBRES	A
39	KOMP.PSR CINDERAMATA	PASARKLIWON	KAUMAN	A
40	KOMP.PSR DEPOK	BANJARSARI	MANAHAN	A
41	KOMP.PSR ELPABES	BANJARSARI	STABELAN	A
42	KOMP.PSR. GADING	PASARKLIWON	GAJAHAN	A
43	KOMP.PSR. GEDE	JEBRES	SUDIROPRAJAN	A
44	KOMP.PSR. HARJODAKSINO	SERENGAN	DANUKUSUMAN	A
45	KOMP.PSR. JEBRES	JEBRES	PURWODININGRATAN	A
46	KOMP.PSR. JOGLO	BANJARSARI	KADIPIRO	A
47	KOMP.PSR. JONGKE	LAWEYAN	PAJANG	A
48	KOMP.PSR. JONGKE	LAWEYAN	SONDAKAN	A
49	KOMP.PSR. KABANGAN	LAWEYAN	SONDAKAN	A
50	KOMP.PSR. KADIPOLO	LAWEYAN	PANULARAN	A
51	KOMP.PSR. KEMBANG	LAWEYAN	PANULARAN	A
52	KOMP.PSR. KEMBANG	LAWEYAN	SRIWEDARI	A
53	KOMP.PSR. KEMBANG	PASARKLIWON	GAJAHAN	A
54	KOMP.PSR. KLEWER	PASARKLIWON	GAJAHAN	A
55	KOMP.PSR. KLITIKAN NOTOHARJO	PASARKLIWON	SEMANGGI	A
56	KOMP.PSR. LEDOKSARI	JEBRES	PURWODININGRATAN	A
57	KOMP.PSR. LEDOKSARI	LAWEYAN	PAJANG	A
58	KOMP.PSR. LEGI	BANJARSARI	SETABELAN	A
59	KOMP.PSR. MEBEL	BANJARSARI	GILINGAN	A
60	KOMP.PSR. MOJOSONGO	JEBRES	MOJOSONGO	A
61	KOMP.PSR. MOJOSONGO P	JEBRES	MOJOSONGO	A
62	KOMP.PSR. NGARSOPURO	BANJARSARI	TIMURAN	A
63	KOMP.PSR. NGEMPLAK	BANJARSARI	GILINGAN	A
64	KOMP.PSR. NGEMPLAK	JEBRES	MOJOSONGO	A
65	KOMP.PSR. NGEMPLAK	LAWEYAN	KERTEN	A
66	KOMP.PSR. NGUDI REJEKI	BANJARSARI	GILINGAN	A
67	KOMP.PSR. NGUMBUL	BANJARSARI	MANAHAN	A
68	KOMP.PSR. NOTOHARJO	PASARKLIWON	SEMANGGI	A
69	KOMP.PSR. NUSUKAN	BANJARSARI	KADIPIRO	A
70	KOMP.PSR. NUSUKAN	BANJARSARI	NUSUKAN	A

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
71	KOMP.PSR. PANGGUNGREJO	JEBRES	JEBRES	A
72	KOMP.PSR. PENUMPING	LAWEYAN	PENUMPING	A
73	KOMP.PSR. PUCANGSAWIT	JEBRES	PUCANGSAWIT	A
74	KOMP.PSR. PURWOSARI	LAWEYAN	SONDAKAN	A
75	KOMP.PSR. REJOSARI	JEBRES	PURWODININGRATAN	A
76	KOMP.PSR. SANGKRAH	PASARKLIWON	SANGKRAH	A
77	KOMP.PSR. SIDODADI	LAWEYAN	KARANGASEM	A
78	KOMP.PSR. SIDOMULYO	BANJARSARI	GILINGAN	A
79	KOMP.PSR. SINGOSAREN	SERENGAN	KEMLAYAN	A
80	KOMP.PSR. TANGGUL	JEBRES	SEWU	A
81	KOMP.PSR. TRIWINDU	BANJARSARI	KEPRABON	A
82	KOMP.PSR. TUNGGULSARI	PASARKLIWON	SEMANGGI	A
83	KOMP.PSR. TURISARI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	A
84	JL. GUNTUR	JEBRES	JEBRES	B
85	JL. GUNUNG SLAMET	JEBRES	MOJOSONGO	B
86	JL. MELON RAYA	LAWEYAN	KARANGASEM	B
87	JL. NAYU	BANJARSARI	KADIPIRO	B
88	JL. NAYU	BANJARSARI	NUSUKAN	B
89	JL.ABDUL MUIS	BANJARSARI	SETABELAN	B
90	JL.ABDUL MUIS	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
91	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
92	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
93	JL.ADI SUMARMO	BANJARSARI	NUSUKAN	B
94	JL.ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KAUMAN	B
95	JL.ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
96	JL.AMD BAYAN	BANJARSARI	KADIPIRO	B
97	JL.ANGGUR	LAWEYAN	JAJAR	B
98	JL.ANGKASA	JEBRES	JEBRES	B
99	JL.APEL	LAWEYAN	KERTEN	B
100	JL.AR.HAKIM	BANJARSARI	SETABELAN	B
101	JL.AR.HAKIM	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
102	JL.AR.HAKIM	JEBRES	TEGALHARJO	B
103	JL.ARIFIN	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
104	JL.ARIFIN	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	B
105	JL.ARIFIN	JEBRES	TEGALHARJO	B
106	JL.ARIFIN	PASARKLIWON	KAMPUNG BARU	B
107	JL.ARJUNA	SERENGAN	SERENGAN	B
108	JL.BARON KECIL	LAWEYAN	BUMI	B
109	JL.BENGAWAN SOLO	PASARKLIWON	SEMANGGI	B
110	JL.BHAYANGKARA	LAWEYAN	PANULARAN	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
111	JL.BHAYANGKARA	LAWEYAN	PENUMPING	B
112	JL.BHAYANGKARA	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
113	JL.BLEWAH RAYA	LAWEYAN	KARANGASEM	B
114	JL.BONE UTAMA	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
115	JL.BRIG.SUDIARTO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
116	JL.BRIG.SUDIARTO	PASARKLIWON	JOYOSURAN	B
117	JL.BRIG.SUDIARTO	SERENGAN	DANUKUSUMAN	B
118	JL.BRIG.SUDIARTO	SERENGAN	JOYOTAKAN	B
119	JL.BRIGJEND KATAMSO	JEBRES	JEBRES	B
120	JL.BRIGJEND KATAMSO	JEBRES	MOJOSONGO	B
121	JL.BRIGJEND KATAMSO	JEBRES	TEGALHARJO	B
122	JL.CARANGAN	PASARKLIWON	BALUWARTI	B
123	JL.CILIWUNG	PASARKLIWON	JOYOSURAN	B
124	JL.COLOLO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
125	JL.DI.PANJAITAN	BANJARSARI	GILINGAN	B
126	JL.DI.PANJAITAN	BANJARSARI	SETABELAN	B
127	JL.DIPONEGORO	BANJARSARI	KEPRABON	B
128	JL.DIPONEGORO	BANJARSARI	KEPRABON	B
129	JL.DIPONEGORO	BANJARSARI	TIMURAN	B
130	JL.DR.CIPTO MANGUNKUSUMO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
131	JL.DR.CIPTO MANGUNKUSUMO	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
132	JL.DR.MUWARDI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
133	JL.DR.MUWARDI	LAWEYAN	PENUMPING	B
134	JL.DR.MUWARDI	LAWEYAN	PURWOSARI	B
135	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	BUMI	B
136	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	LAWEYAN	B
137	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	PAJANG	B
138	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	PANULARAN	B
139	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	PENUMPING	B
140	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	SONDAKAN	B
141	JL.DR.RAJIMAN	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
142	JL.DR.RAJIMAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
143	JL.DR.RAJIMAN	PASARKLIWON	KAUMAN	B
144	JL.DR.RAJIMAN	SERENGAN	JAYENGAN	B
145	JL.DR.RAJIMAN	SERENGAN	KEMLAYAN	B
146	JL.DR.SUTOMO	LAWEYAN	PENUMPING	B
147	JL.DR.SUTOMO	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
148	JL.DR.WAHIDIN	LAWEYAN	BUMI	B
149	JL.DR.WAHIDIN	LAWEYAN	PENUMPING	B
150	JL.DR.WAHIDIN	LAWEYAN	PURWOSARI	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
151	JL.DRS.YAP.TJWAN.BING	JEBRES	JAGALAN	B
152	JL.FAJAR INDAH	LAWEYAN	JAJAR	B
153	JL.FAJAR INDAH	LAWEYAN	KERTEN	B
154	JL.GAJAH MADA	BANJARSARI	KETELAN	B
155	JL.GAJAH MADA	BANJARSARI	PUNGGAWAN	B
156	JL.GAJAH MADA	BANJARSARI	TIMURAN	B
157	JL.GAJAHAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
158	JL.GANDEKAN	JEBRES	GANDEKAN	B
159	JL.GATOT SUBROTO	SERENGAN	JAYENGAN	B
160	JL.GATOT SUBROTO	SERENGAN	KEMLAYAN	B
161	JL.GATOT SUBROTO	SERENGAN	KRATONAN	B
162	JL.GAYAMSARI	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
163	JL.GESANG	SERENGAN	KEMLAYAN	B
164	JL.GONDOSULI	LAWEYAN	PURWOSARI	B
165	JL.GUNUNG SLAMET IV	BANJARSARI	BANJARSARI	B
166	JL.GURUH	JEBRES	JEBRES	B
167	JL.HASANUDDIN	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
168	JL.HASANUDDIN	BANJARSARI	PUNGGAWAN	B
169	JL.HASANUDDIN	LAWEYAN	PURWOSARI	B
170	JL.HONGGOWONGSO	LAWEYAN	PANULARAN	B
171	JL.HONGGOWONGSO	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
172	JL.HONGGOWONGSO	SERENGAN	JAYENGAN	B
173	JL.HONGGOWONGSO	SERENGAN	KEMLAYAN	B
174	JL.HONGGOWONGSO	SERENGAN	KRATONAN	B
175	JL.HONGGOWONGSO	SERENGAN	TIPES	B
176	JL.IBU PERTIWI	PASARKLIWON	PASARKLIWON	B
177	JL.IMAM BONJOL	BANJARSARI	KEPRABON	B
178	JL.IMAM BONJOL	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	B
179	JL.IR.JUANDA	JEBRES	GANDEKAN	B
180	JL.IR.JUANDA	JEBRES	JAGALAN	B
181	JL.IR.JUANDA	JEBRES	JEBRES	B
182	JL.IR.JUANDA	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
183	JL.IR.JUANDA	JEBRES	PURWODININGRATAN	B
184	JL.IR.JUANDA	JEBRES	SEWU	B
185	JL.IR.JUANDA	JEBRES	SUDIROPRAJAN	B
186	JL.JAGERAN	BANJARSARI	KETELAN	B
187	JL.JAYA WIJAYA	BANJARSARI	KADIPIRO	B
188	JL.JAYA WIJAYA	JEBRES	JEBRES	B
189	JL.JAYA WIJAYA	JEBRES	MOJOSONGO	B
190	JL.JENGGOLO	BANJARSARI	NUSUKAN	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
191	JL.KAHURIPAN III	BANJARSARI	SUMBER	B
192	JL.KAHURIPAN TIMUR	BANJARSARI	SUMBER	B
193	JL.KALI SIMPANG	JEBRES	JAGALAN	B
194	JL.KALILARANGAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
195	JL.KALILARANGAN	SERENGAN	JAYENGAN	B
196	JL.KALITAN	LAWEYAN	PENUMPING	B
197	JL.KAPT.DR.PRAKOSA	BANJARSARI	KADIPIRO	B
198	JL.KAPT.MULYADI	JEBRES	SUDIROPRAJAN	B
199	JL.KAPT.MULYADI	JEBRES	TEGALHARJO	B
200	JL.KAPT.MULYADI	PASARKLIWON	JOYOSURAN	B
201	JL.KAPT.MULYADI	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
202	JL.KAPT.MULYADI	PASARKLIWON	PASAR KLIWON	B
203	JL.KAPT.PIERRE TENDEAN	BANJARSARI	NUSUKAN	B
204	JL.KASUNANAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
205	JL.KEBANGKITAN NASIONAL	LAWEYAN	PENUMPING	B
206	JL.KEBANGKITAN NASIONAL	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
207	JL.KEMASAN	JEBRES	JEBRES	B
208	JL.KEMASAN	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	B
209	JL.KETANDAN	JEBRES	SUDIROPRAJAN	B
210	JL.KH.AGUS SALIM	LAWEYAN	SONDAKAN	B
211	JL.KH.AHMAD DAHLAN	BANJARSARI	KEPRABON	B
212	JL.KH.SAMANHUDI	LAWEYAN	BUMI	B
213	JL.KH.SAMANHUDI	LAWEYAN	PURWOSARI	B
214	JL.KH.SAMANHUDI	LAWEYAN	SONDAKAN	B
215	JL.KI GEDE SOLO	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
216	JL.KI MANGUNSARKORO	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
217	JL.KI MANGUNSARKORO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
218	JL.KI MANGUNSARKORO	BANJARSARI	NUSUKAN	B
219	JL.KI MANGUNSARKORO	BANJARSARI	SUMBER	B
220	JL.KI.HAJAR DEWANTORO	JEBRES	JEBRES	B
221	JL.KOL.SUGIYONO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
222	JL.KOL.SUGIYONO	BANJARSARI	NUSUKAN	B
223	JL.KRAJAN	JEBRES	JEBRES	B
224	JL.KS.TUBUN	BANJARSARI	MANAHAN	B
225	JL.KUNIR	LAWEYAN	PAJANG	B
226	JL.KYAI MOJO	JEBRES	JEBRES	B
227	JL.KYAI MOJO	PASARKLIWON	JOYOSURAN	B
228	JL.KYAI MOJO	PASARKLIWON	MOJO	B
229	JL.KYAI MOJO	PASARKLIWON	PASAR KLIWON	B
230	JL.KYAI MOJO	PASARKLIWON	SEMANGGI	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
231	JL.LAWU	BANJARSARI	MANAHAN	B
232	JL.LETJEN.SUPRAPTO	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
233	JL.LETJEN.SUPRAPTO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
234	JL.LETJEN.SUPRAPTO	BANJARSARI	MANAHAN	B
235	JL.LETJEN.SUPRAPTO	BANJARSARI	SUMBER	B
236	JL.LETJEN.SUPRAPTO	LAWEYAN	KERTEN	B
237	JL.LETJEN.SUTOYO	BANJARSARI	GILINGAN	B
238	JL.LETJEN.SUTOYO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
239	JL.LETJEN.SUTOYO	BANJARSARI	NUSUKAN	B
240	JL.LETJEN.SUTOYO	JEBRES	MOJOSONGO	B
241	JL.MAGANGAN	PASARKLIWON	BALUWARTI	B
242	JL.MANGKUBUMEN	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
243	JL.MANGKUBUMEN	PASARKLIWON	BALUWARTI	B
244	JL.MATARAM	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
245	JL.MATARAM	BANJARSARI	SUMBER	B
246	JL.MAYOR KUSMANTO	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
247	JL.MAYOR SUNARYO	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
248	JL.MEGA	JEBRES	JEBRES	B
249	JL.MENTERI SUPENO	BANJARSARI	MANAHAN	B
250	JL.MERBABU RAYA	JEBRES	MOJOSONGO	B
251	JL.MT.ARIFIN	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
252	JL.MT.ARIFIN	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	B
253	JL.MT.ARIFIN	JEBRES	TEGALHARJO	B
254	JL.MT.ARIFIN	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	B
255	JL.MT.HARYONO	BANJARSARI	MANAHAN	B
256	JL.MT.HARYONO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
257	JL.MT.HARYONO	BANJARSARI	SUMBER	B
258	JL.MUH YAMIN	LAWEYAN	PANULARAN	B
259	JL.MUH YAMIN	SERENGAN	JAYENGAN	B
260	JL.MUH YAMIN	SERENGAN	KRATONAN	B
261	JL.MUH YAMIN	SERENGAN	TIPES	B
262	JL.NGEMPLAK SULTAN	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
263	JL.PAKU BUWONO	PASARKLIWON	KAUMAN	B
264	JL.PELATUK	BANJARSARI	MANAHAN	B
265	JL.PELATUK	LAWEYAN	KERTEN	B
266	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	LAWEYAN	BUMI	B
267	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	LAWEYAN	PURWOSARI	B
268	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN	LAWEYAN	SONDAKAN	B
269	JL.PLERET RAYA	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
270	JL.PORONG	JEBRES	PUCANGSAWIT	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
271	JL.PRACANDA	JEBRES	JEBRES	B
272	JL.PRACANDA I	JEBRES	JEBRES	B
273	JL.PROF.DR.SUHARSO	LAWEYAN	JAJAR	B
274	JL.PROF.DR.SUPOMO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
275	JL.PROF.DR.SUPOMO	BANJARSARI	PUNGGAWAN	B
276	JL.PROF.DR.SUPOMO	BANJARSARI	TIMURAN	B
277	JL.PROF.DR.SUPOMO	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
278	JL.RA.KARTINI	BANJARSARI	KETELAN	B
279	JL.RA.KARTINI	BANJARSARI	TIMURAN	B
280	JL.RANDUSARI	BANJARSARI	KADIPIRO	B
281	JL.REKSONITEN	JEBRES	GAJAHAN	B
282	JL.RING ROAD UTARA	PASARKLIWON	MOJOSONGO	B
283	JL.RM.SAID	BANJARSARI	KEPRABON	B
284	JL.RM.SAID	BANJARSARI	KETELAN	B
285	JL.RM.SAID	BANJARSARI	MANAHAN	B
286	JL.RM.SAID	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
287	JL.RM.SAID	BANJARSARI	PUNGGAWAN	B
288	JL.RONGGOWARSITO	BANJARSARI	KEPRABON	B
289	JL.RONGGOWARSITO	BANJARSARI	TIMURAN	B
290	JL.RONGGOWARSITO	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	B
291	JL.S.PARMAN	BANJARSARI	GILINGAN	B
292	JL.S.PARMAN	BANJARSARI	KESTALAN	B
293	JL.S.PARMAN	BANJARSARI	SETABELAN	B
294	JL.SABANG	BANJARSARI	SETABELAN	B
295	JL.SABANG	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
296	JL.SABRANG KULON	JEBRES	MOJOSONGO	B
297	JL.SADEWA	BANJARSARI	BANJARSARI	B
298	JL.SAHARJO	BANJARSARI	KEPRABON	B
299	JL.SAHARJO	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	B
300	JL.SAMBENG	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
301	JL.SAMSU RIZAL	BANJARSARI	SETABELAN	B
302	JL.SASONO MULYO	PASARKLIWON	BALUWARTI	B
303	JL.SEMERU	BANJARSARI	GILINGAN	B
304	JL.SEMERU	JEBRES	TEGALHARJO	B
305	JL.SETIAKI	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
306	JL.SIDOLUHUR	LAWEYAN	LAWEYAN	B
307	JL.SIDOLUHUR	LAWEYAN	PAJANG	B
308	JL.SINDUTAN	JEBRES	PURWODININGRATAN	B
309	JL.SINGOSARI SELATAN	BANJARSARI	NUSUKAN	B
310	JL.SINGOSARI TIMUR	BANJARSARI	NUSUKAN	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
311	JL.SINGOSARI UTARA	BANJARSARI	NUSUKAN	B
312	JL.SOROGENI	SERENGAN	JAYENGAN	B
313	JL.SRI GADING	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
314	JL.SUBEKTI	BANJARSARI	SETABELAN	B
315	JL.SUMPAH PEMUDA	BANJARSARI	KADIPIRO	B
316	JL.SUMPAH PEMUDA	JEBRES	MOJOSONGO	B
317	JL.SUNGAI BRANTAS	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
318	JL.SUNGAI MEMBRAMO	JEBRES	GANDEKAN	B
319	JL.SUNGAI PALU	JEBRES	SEWU	B
320	JL.SUPIT URANG	PASARKLIWON	KEDUNG LUMBU	B
321	JL.SURYO PRANOTO	SERENGAN	KEMLAYAN	B
322	JL.SUTAN SAHRIR	BANJARSARI	KESTALAN	B
323	JL.SUTAN SAHRIR	BANJARSARI	KETELAN	B
324	JL.SUTAN SAHRIR	BANJARSARI	SETABELAN	B
325	JL.SUTAN SAHRIR	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
326	JL.SUTAN SAHRIR	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	B
327	JL.TARUMA NEGARA BARAT I	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
328	JL.TARUMA NEGARA BARAT II	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
329	JL.TARUMA NEGARA DALAM I	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
330	JL.TARUMA NEGARA DALAM II	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
331	JL.TARUMA NEGARA II	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
332	JL.TARUMA NEGARA UTAMA	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
333	JL.TEMPURREJO	BANJARSARI	SUMBER	B
334	JL.TENTARA GENIE PELAJAR	BANJARSARI	GILINGAN	B
335	JL.TENTARA GENIE PELAJAR	JEBRES	MOJOSONGO	B
336	JL.TENTARA PELAJAR	BANJARSARI	GILINGAN	B
337	JL.TENTARA PELAJAR	BANJARSARI	NUSUKAN	B
338	JL.TENTARA PELAJAR	JEBRES	JEBRES	B
339	JL.TENTARA PELAJAR	JEBRES	MOJOSONGO	B
340	JL.TEUKU UMAR	BANJARSARI	KEPRABON	B
341	JL.TIRTO SUMIRAT	LAWEYAN	BUMI	B
342	JL.TIRTONADI	BANJARSARI	GILINGAN	B
343	JL.TRIKORA	BANJARSARI	MANAHAN	B
344	JL.TULANG BAWANG	BANJARSARI	KADIPIRO	B
345	JL.UNTUNG SUROPATI	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
346	JL.UNTUNG SUROPATI	PASARKLIWON	PASAR KLIWON	B
347	JL.UNTUNG SUROPATI	PASARKLIWON	SANGKRAH	B
348	JL.UNTUNG SUROPATI	PASARKLIWON	SEMANGGI	B
349	JL.VETERAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
350	JL.VETERAN	PASARKLIWON	JOYOSURAN	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
351	JL.VETERAN	PASARKLIWON	PASAR KLIWON	B
352	JL.VETERAN	PASARKLIWON	SEMANGGI	B
353	JL.VETERAN	SERENGAN	DANUKUSUMAN	B
354	JL.VETERAN	SERENGAN	KRATONAN	B
355	JL.VETERAN	SERENGAN	SERENGAN	B
356	JL.VETERAN	SERENGAN	TIPES	B
357	JL.WAHYU TUMURUN	LAWEYAN	BUMI	B
358	JL.WARINGIN	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
359	JL.WERDI SASTRO	BANJARSARI	SETABELAN	B
360	JL.WOLTER MONGINSIDI	BANJARSARI	GILINGAN	B
361	JL.WOLTER MONGINSIDI	BANJARSARI	KESTALAN	B
362	JL.WOLTER MONGINSIDI	BANJARSARI	SETABELAN	B
363	JL.WOLTER MONGINSIDI	JEBRES	KEPATIHAN KULON	B
364	JL.WOLTER MONGINSIDI	JEBRES	MOJOSONGO	B
365	JL.WOLTER MONGINSIDI	JEBRES	TEGALHARJO	B
366	JL.WORA WARI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
367	JL.WORA WARI	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
368	JL.WORO WARI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
369	JL.WORO WARI	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
370	JL.YOS SUDARSO	PASARKLIWON	GAJAHAN	B
371	JL.YOS SUDARSO	PASARKLIWON	KAUMAN	B
372	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	DANUKUSUMAN	B
373	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	JAYENGAN	B
374	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	JOYOTAKAN	B
375	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	KEMLAYAN	B
376	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	KRATONAN	B
377	JL.YOS SUDARSO	SERENGAN	SERENGAN	B
378	JL.YOSODIPURO	BANJARSARI	KETELAN	B
379	JL.YOSODIPURO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
380	JL.YOSODIPURO	BANJARSARI	PUNGGAWAN	B
381	JL.YOSODIPURO	BANJARSARI	TIMURAN	B
382	KOMP. PASAR BURUNG DEPOK	BANJARSARI	MANAHAN	B
383	KOMP.BALAPAN	BANJARSARI	KESTALAN	B
384	KOMP.PSR. MATAHARI SINGOSAREN	SERENGAN	KEMLAYAN	B
385	KOMP.TERMINAL TIRTONADI	BANJARSARI	GILINGAN	B
386	KP.BADRAN	JEBRES	MOJOSONGO	B
387	KP.BANYUANYAR	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
388	KP.BANYUANYAR	BANJARSARI	SUMBER	B
389	KP.BARON CILIK	LAWEYAN	BUMI	B
390	KP.BARON KUNDEN	LAWEYAN	PANULARAN	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
391	KP.BENDOSARI	LAWEYAN	PAJANG	B
392	KP.BULAK INDAH	LAWEYAN	KARANGASEM	B
393	KP.BUSUKAN	JEBRES	MOJOSONGO	B
394	KP.CANGAKAN	BANJARSARI	NUSUKAN	B
395	KP.CINDEREJO	BANJARSARI	GILINGAN	B
396	KP.CINDEREJO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
397	KP.DEBEGAN	JEBRES	MOJOSONGO	B
398	KP.DEPOK	BANJARSARI	MANAHAN	B
399	KP.DISTRIKAN	BANJARSARI	NUSUKAN	B
400	KP.GANDEKAN	JEBRES	GANDEKAN	B
401	KP.GANDEKAN KIWO	SERENGAN	JAYENGAN	B
402	KP.GEBANG	BANJARSARI	KADIPIRO	B
403	KP.GRIYAN	BANJARSARI	KADIPIRO	B
404	KP.GRIYAN	LAWEYAN	PAJANG	B
405	KP.JOYOTAKAN	SERENGAN	JOYOTAKAN	B
406	KP.KADIPIRO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
407	KP.KAGOKAN	LAWEYAN	PAJANG	B
408	KP.KALI PEPE	JEBRES	SUDIROPARAJAN	B
409	KP.KARANGASEM	BANJARSARI	KADIPIRO	B
410	KP.KARANGASEM	JEBRES	GANDEKAN	B
411	KP.KARANGASEM	LAWEYAN	KARANGASEM	B
412	KP.KARANGTURI	LAWEYAN	PAJANG	B
413	KP.KARTOPURAN	SERENGAN	JAYENGAN	B
414	KP.KENTINGAN	JEBRES	JEBRES	B
415	KP.KESTALAN	BANJARSARI	KESTALAN	B
416	KP.KETELAN	BANJARSARI	KETELAN	B
417	KP.LEMPUYANG	LAWEYAN	PAJANG	B
418	KP.MARGOREJO	BANJARSARI	BANYUANYAR	B
419	KP.MARGOREJO	BANJARSARI	GILINGAN	B
420	KP.MARGOREJO	BANJARSARI	KADIPIRO	B
421	KP.MARGOREJO	BANJARSARI	KESTALAN	B
422	KP.MOJOSONGO	JEBRES	MOJOSONGO	B
423	KP.MUTIHAN	LAWEYAN	SONDAKAN	B
424	KP.NGASINAN	JEBRES	JEBRES	B
425	KP.NGORESAN	JEBRES	JEBRES	B
426	KP.NGORESAN	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
427	KP.NOROWANGSAN	LAWEYAN	PAJANG	B
428	KP.PAJANG	BANJARSARI	GILINGAN	B
429	KP.PAJANG	LAWEYAN	KERTEN	B
430	KP.PAJANG	LAWEYAN	PAJANG	B

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
431	KP.PANULARAN	BANJARSARI	KADIPIRO	B
432	KP.PANULARAN	LAWEYAN	PANULARAN	B
433	KP.PETIR	JEBRES	JEBRES	B
434	KP.PETORAN	JEBRES	JEBRES	B
435	KP.POSANAN	JEBRES	TEGALHARJO	B
436	KP.PREMULUNG	LAWEYAN	SONDAKAN	B
437	KP.PRINGGOLAYAN	SERENGAN	TIPES	B
438	KP.PRIYOBADAN	BANJARSARI	TIMURAN	B
439	KP.PRIYOBADAN	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
440	KP.PULUKAN	JEBRES	PURWODININGRATAN	B
441	KP.PURWOPRAJAN	JEBRES	JEBRES	B
442	KP.PURWOSARI	LAWEYAN	PURWOSARI	B
443	KP.SABRANG KULON	JEBRES	MOJOSONGO	B
444	KP.SABRANG LOR	JEBRES	MOJOSONGO	B
445	KP.SANGKRAH	PASARKLIWON	SANGKRAH	B
446	KP.SEKARPACE	JEBRES	PUCANGSAWIT	B
447	KP.SEMANGGI	PASARKLIWON	SEMANGGI	B
448	KP.SETIAKI	LAWEYAN	SRIWEDARI	B
449	KP.SIDODADI	LAWEYAN	PAJANG	B
450	KP.SIDOREJO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
451	KP.SIDOREJO	JEBRES	MOJOSONGO	B
452	KP.SONGGALAN	LAWEYAN	PAJANG	B
453	KP.SRI NARENDRA	LAWEYAN	PANULARAN	B
454	KP.SRI NARENDRA	PASARKLIWON	PASAR KLIWON	B
455	KP.SRI NARENDRA	SERENGAN	DANUKUSUMAN	B
456	KP.SRI NARENDRA	SERENGAN	TIPES	B
457	KP.SUMBER	BANJARSARI	SUMBER	B
458	KP.TAMTAMAN	PASARKLIWON	BALUWARTI	B
459	KP.TEGAL ASRI	BANJARSARI	KADIPIRO	B
460	KP.TEGAL KEMBANG	LAWEYAN	PAJANG	B
461	KP.TEGAL MULYO	BANJARSARI	NUSUKAN	B
462	KP.TEGAL MULYO	JEBRES	MOJOSONGO	B
463	KP.TEGAL MULYO	LAWEYAN	PURWOSARI	B
464	KP.TURISARI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	B
465	KP.WONOSAREN	JEBRES	JAGALAN	B
466	KP.YOSODIPURAN	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	B
467	ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KAUMAN	C
468	ALUN ALUN UTARA	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
469	JL.A.R.SALEH	BANJARSARI	KESTALAN	C
470	JL.A.R.SALEH	BANJARSARI	SETABELAN	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
471	JL.A.R.SALEH	JEBRES	KEPATIHAN KULON	C
472	JL.ABIYOSO	LAWEYAN	SRIWEDARI	C
473	JL.AM.SANGAJI	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
474	JL.ANGLING DARMO	LAWEYAN	PENUMPING	C
475	JL.ARUMDALU	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
476	JL.BANDA	BANJARSARI	KEPRABON	C
477	JL.BANGAU	BANJARSARI	MANAHAN	C
478	JL.BANGKA	BANJARSARI	SETABELAN	C
479	JL.BASUKI RAHMAT	LAWEYAN	JAJAR	C
480	JL.BASUKI RAHMAT	LAWEYAN	KERTEN	C
481	JL.BEKISAR	BANJARSARI	MANAHAN	C
482	JL.BETON	JEBRES	SEWU	C
483	JL.BHAYANGKARA	SERENGAN	TIPES	C
484	JL.BIDO	BANJARSARI	GILINGAN	C
485	JL.BIMA	BANJARSARI	BANYUANYAR	C
486	JL.BIMA	SERENGAN	JOYOTAKAN	C
487	JL.BIMA	SERENGAN	SERENGAN	C
488	JL.BIMA SAKTI	JEBRES	JEBRES	C
489	JL.BLIMBING	LAWEYAN	KERTEN	C
490	JL.BLIMBING	LAWEYAN	PAJANG	C
491	JL.BOGOWONTO	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
492	JL.BROMO	BANJARSARI	KADIPIRO	C
493	JL.BUNGUR	BANJARSARI	PUNGGAWAN	C
494	JL.CEMPAKA	JEBRES	JEBRES	C
495	JL.CEMPAKA	LAWEYAN	PURWOSARI	C
496	JL.CEMPAKA	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
497	JL.CERMAI	BANJARSARI	GILINGAN	C
498	JL.CERMAI	JEBRES	PUCANGSAWIT	C
499	JL.CERMAI	JEBRES	TEGALHARJO	C
500	JL.CERMAI	LAWEYAN	KARANGASEM	C
501	JL.CIPUNEGARA	PASARKLIWON	JOYOSURAN	C
502	JL.CISADANE	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
503	JL.COCAK	BANJARSARI	KADIPIRO	C
504	JL.COCAK	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
505	JL.COKROBASKORO	SERENGAN	TIPES	C
506	JL.CUT NYAK DIEN	JEBRES	GANDEKAN	C
507	JL.CUT NYAK DIEN	JEBRES	SUDIROPRAJAN	C
508	JL.DAMAR	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
509	JL.DEMAK BINTORO	BANJARSARI	NUSUKAN	C
510	JL.DEMAK BINTORO	JEBRES	JEBRES	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
511	JL.DERKUKU	BANJARSARI	MANAHAN	C
512	JL.DEWI SARTIKA	SERENGAN	DANUKUSUMAN	C
513	JL.DR.SETIABUDI	BANJARSARI	GILINGAN	C
514	JL.DR.SETIABUDI	BANJARSARI	MANAHAN	C
515	JL.DR.SETIABUDI	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
516	JL.DUKU	LAWEYAN	JAJAR	C
517	JL.DUKU	LAWEYAN	KERTEN	C
518	JL.DUWET	LAWEYAN	KARANGASEM	C
519	JL.GAJAH SURANTO	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
520	JL.GAMBIAN	LAWEYAN	BUMI	C
521	JL.GARUDA	BANJARSARI	KADIPIRO	C
522	JL.GARUDA	BANJARSARI	MANAHAN	C
523	JL.GARUDA	JEBRES	MOJOSONGO	C
524	JL.GARUDA	LAWEYAN	KARANGASEM	C
525	JL.GOTONG ROYONG	JEBRES	JAGALAN	C
526	JL.GOTONG ROYONG	JEBRES	SEWU	C
527	JL.GUNUNG KAWI	BANJARSARI	KADIPIRO	C
528	JL.GUNUNG KELUD	BANJARSARI	KADIPIRO	C
529	JL.GUNUNG KELUD	BANJARSARI	MANAHAN	C
530	JL.GUNUNG KELUD	BANJARSARI	NUSUKAN	C
531	JL.GUNUNG SLAMET	BANJARSARI	KADIPIRO	C
532	JL.HADIWIJAYAN	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
533	JL.HARYO PANULAR	LAWEYAN	PANULARAN	C
534	JL.HOS COKROAMINOTO	JEBRES	JAGALAN	C
535	JL.HOS COKROAMINOTO	JEBRES	JEBRES	C
536	JL.HOS COKROAMINOTO	JEBRES	PUCANGSAWIT	C
537	JL.IRIAN	JEBRES	TEGALHARJO	C
538	JL.JAMBU	LAWEYAN	JAJAR	C
539	JL.JAMSAREN	SERENGAN	SERENGAN	C
540	JL.JAMSAREN	SERENGAN	TIPES	C
541	JL.JAWA	BANJARSARI	TIMURAN	C
542	JL.JOKO TINGKIR	LAWEYAN	PAJANG	C
543	JL.KACER	BANJARSARI	MANAHAN	C
544	JL.KAHAR MUZAKIR	PASARKLIWON	JOYOSURAN	C
545	JL.KAHAR MUZAKIR	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
546	JL.KAHURIPAN	BANJARSARI	BANYUANYAR	C
547	JL.KAHURIPAN	BANJARSARI	SUMBER	C
548	JL.KAHURIPAN	JEBRES	MOJOSONGO	C
549	JL.KALIMOSODO	PASARKLIWON	KAUMAN	C
550	JL.KALINGGA	BANJARSARI	KADIPIRO	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
551	JL.KARTIKA	JEBRES	JEBRES	C
552	JL.KAUMAN	BANJARSARI	KESTALAN	C
553	JL.KAUMAN	PASARKLIWON	KAUMAN	C
554	JL.KEDASIH	LAWEYAN	KERTEN	C
555	JL.KENANGA	LAWEYAN	PAJANG	C
556	JL.KENANGA	LAWEYAN	PURWOSARI	C
557	JL.KEPODANG	BANJARSARI	KADIPIRO	C
558	JL.KEPODANG	BANJARSARI	MANAHAN	C
559	JL.KEPODANG	LAWEYAN	KERTEN	C
560	JL.KERINCI	BANJARSARI	KADIPIRO	C
561	JL.KERINCI	BANJARSARI	MANAHAN	C
562	JL.KH.HASYIM ASHARI	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
563	JL.KH.HASYIM ASHARI	PASARKLIWON	KAUMAN	C
564	JL.KH.MASKUR	JEBRES	JEBRES	C
565	JL.KH.WAHID HASYIM	SERENGAN	JOYOTAKAN	C
566	JL.KI.AGENG MANGIR	LAWEYAN	PENUMPING	C
567	JL.KUSUMOYUDAN	BANJARSARI	KEPRABON	C
568	JL.KUSUMOYUDAN	BANJARSARI	SETABELAN	C
569	JL.KUSUMOYUDAN	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	C
570	JL.KUTAI	BANJARSARI	SUMBER	C
571	JL.KYAI GEDE	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
572	JL.LANGEN DRIYAN	SERENGAN	KEMLAYAN	C
573	JL.LARASATI	SERENGAN	SERENGAN	C
574	JL.LATAR IRENG	LAWEYAN	BUMI	C
575	JL.LATAR PUTIH	LAWEYAN	SONDAKAN	C
576	JL.LINGGA	BANJARSARI	SETABELAN	C
577	JL.LOMPO BATANG	JEBRES	MOJOSONGO	C
578	JL.M.WALAMDA MARAMISE	BANJARSARI	NUSUKAN	C
579	JL.MADUBRONTO	LAWEYAN	SONDAKAN	C
580	JL.MADYOTAMAN	BANJARSARI	PUNGGAWAN	C
581	JL.MAHESOSURO	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
582	JL.MAJAPAHIT	BANJARSARI	GILINGAN	C
583	JL.MAJAPAHIT	BANJARSARI	NUSUKAN	C
584	JL.MAKAM HAJI	LAWEYAN	PAJANG	C
585	JL.MANDURO	SERENGAN	KRATONAN	C
586	JL.MANUNGGAL	BANJARSARI	KADIPIRO	C
587	JL.MARAMIS	BANJARSARI	NUSUKAN	C
588	JL.MASSELA	JEBRES	KEPATIHAN KULON	C
589	JL.MAWAR	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
590	JL.MAWAR	LAWEYAN	PENUMPING	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
591	JL.MAWAR	LAWEYAN	PURWOSARI	C
592	JL.MAYOR ACHMADI	JEBRES	MOJOSONGO	C
593	JL.MELATI	BANJARSARI	BANYUANYAR	C
594	JL.MELATI	JEBRES	JEBRES	C
595	JL.MELATI	LAWEYAN	PURWOSARI	C
596	JL.MERAK	BANJARSARI	GILINGAN	C
597	JL.MERAPI	BANJARSARI	MANAHAN	C
598	JL.MERAPI	BANJARSARI	NUSUKAN	C
599	JL.MERPATI	LAWEYAN	KERTEN	C
600	JL.MERTOLULUTAN	JEBRES	PURWODININGRATAN	C
601	JL.MH.THAMRIN	BANJARSARI	MANAHAN	C
602	JL.MH.THAMRIN	LAWEYAN	KERTEN	C
603	JL.MOJO	LAWEYAN	KARANGASEM	C
604	JL.MR.SARTONO	BANJARSARI	NUSUKAN	C
605	JL.MR.SARTONO	JEBRES	MOJOSONGO	C
606	JL.MUSIUM	LAWEYAN	SRIWEDARI	C
607	JL.NATUNA	BANJARSARI	KESTALAN	C
608	JL.NGEBRUSAN	BANJARSARI	KESTALAN	C
609	JL.NUSA INDAH	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
610	JL.NUSA INDAH	BANJARSARI	PUNGGAWAN	C
611	JL.NUSA INDAH	LAWEYAN	PURWOSARI	C
612	JL.OPAK	PASARKLIWON	JOYOSURAN	C
613	JL.OPAK	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
614	JL.P.LUMBAN TOBING	BANJARSARI	SETABELAN	C
615	JL.PADMONEGORO	PASARKLIWON	GAJAHAN	C
616	JL.PADMONEGORO	SERENGAN	DANUKUSUMAN	C
617	JL.PAJAJARAN	BANJARSARI	SUMBER	C
618	JL.PAJAJARAN BARAT	BANJARSARI	SUMBER	C
619	JL.PAJAJARAN SELATAN	BANJARSARI	SUMBER	C
620	JL.PAJAJARAN SELATAN	LAWEYAN	KERTEN	C
621	JL.PAJAJARAN TENGAH	BANJARSARI	SUMBER	C
622	JL.PAJAJARAN TIMUR	BANJARSARI	SUMBER	C
623	JL.PAJAJARAN UTARA	BANJARSARI	SUMBER	C
624	JL.PAKEL	BANJARSARI	BANYUANYAR	C
625	JL.PAKEL	BANJARSARI	SUMBER	C
626	JL.PAKEL	LAWEYAN	JAJAR	C
627	JL.PAKEL	LAWEYAN	KERTEN	C
628	JL.PAMEDAN	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
629	JL.PAMUGARAN	BANJARSARI	KADIPIRO	C
630	JL.PANGERAN WIJIL	SERENGAN	TIPES	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
631	JL.PAPAGAN	LAWEYAN	PAJANG	C
632	JL.PARANG BARIS	LAWEYAN	SONDAKAN	C
633	JL.PARANG KUSUMO	LAWEYAN	PAJANG	C
634	JL.PARANG KUSUMO	LAWEYAN	SONDAKAN	C
635	JL.PARANG LIRIS	LAWEYAN	PAJANG	C
636	JL.PARANG LIRIS	LAWEYAN	SONDAKAN	C
637	JL.PASAR GEDE UTARA	JEBRES	SUDIROPRAJAN	C
638	JL.PATIMURA	SERENGAN	DANUKUSUMAN	C
639	JL.PATIMURA	SERENGAN	SERENGAN	C
640	JL.PATIMURA	SERENGAN	TIPES	C
641	JL.PELANGI	JEBRES	MOJOSONGO	C
642	JL.PONCONOKO	SERENGAN	TIPES	C
643	JL.POPDA	BANJARSARI	NUSUKAN	C
644	JL.PRINGGODANI	SERENGAN	KRATONAN	C
645	JL.PROF.WZ.YOHANES	JEBRES	JAGALAN	C
646	JL.PROF.WZ.YOHANES	JEBRES	PURWODININGRATAN	C
647	JL.PROGO	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
648	JL.PUSPOWARNO	LAWEYAN	PANULARAN	C
649	JL.RAYA KENCUR	LAWEYAN	LAWEYAN	C
650	JL.RE.MARTADINATA	JEBRES	GANDEKAN	C
651	JL.RE.MARTADINATA	JEBRES	PURWODININGRATAN	C
652	JL.RE.MARTADINATA	JEBRES	SEWU	C
653	JL.RE.MARTADINATA	JEBRES	SUDIROPRAJAN	C
654	JL.REBAB	SERENGAN	JOYOTAKAN	C
655	JL.RM.SAHARJO	BANJARSARI	KEPRABON	C
656	JL.RM.SAHARJO	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	C
657	JL.RM.SALEH W.SASTRO	BANJARSARI	SETABELAN	C
658	JL.SAM RATULANGI	BANJARSARI	MANAHAN	C
659	JL.SAM RATULANGI	LAWEYAN	KERTEN	C
660	JL.SAMPANGAN	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
661	JL.SAMPANGAN	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
662	JL.SAMUDRA PASAI	BANJARSARI	KADIPIRO	C
663	JL.SANGIHE	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
664	JL.SAWO	LAWEYAN	JAJAR	C
665	JL.SAWO	LAWEYAN	KARANGASEM	C
666	JL.SAWO	LAWEYAN	KERTEN	C
667	JL.SAWO	LAWEYAN	PAJANG	C
668	JL.SEKAR JAGAD	LAWEYAN	PAJANG	C
669	JL.SEMANGKA	LAWEYAN	KERTEN	C
670	JL.SENOPATI	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
671	JL.SERANG	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
672	JL.SERAYU	PASARKLIWON	SEMANGGI	C
673	JL.SERAYU	SERENGAN	SERENGAN	C
674	JL.SIBELA	JEBRES	MOJOSONGO	C
675	JL.SIDOMUKTI	BANJARSARI	KADIPIRO	C
676	JL.SIDOMUKTI	LAWEYAN	PAJANG	C
677	JL.SINDORO	BANJARSARI	MANAHAN	C
678	JL.SINDORO	JEBRES	MOJOSONGO	C
679	JL.SIWALAN	LAWEYAN	KERTEN	C
680	JL.SRIGUNTING	BANJARSARI	MANAHAN	C
681	JL.SRIGUNTING	LAWEYAN	KERTEN	C
682	JL.SRIKOYO	LAWEYAN	KARANGASEM	C
683	JL.SRIWIJAYA	BANJARSARI	NUSUKAN	C
684	JL.SUGIYO PRANOTO	BANJARSARI	KEPRABON	C
685	JL.SUGIYO PRANOTO	BANJARSARI	SETABELAN	C
686	JL.SUGIYO PRANOTO	PASARKLIWON	KAMPUNGBARU	C
687	JL.SULAWESI	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
688	JL.SUMBING	JEBRES	MOJOSONGO	C
689	JL.SUMBING	JEBRES	PUCANGSAWIT	C
690	JL.SUNAN KALJOGO	LAWEYAN	PENUMPING	C
691	JL.SUNGAI BATANGHARI	JEBRES	GANDEKAN	C
692	JL.SUNGAI BATANGHARI	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
693	JL.SUNGAI INDRAGIRI	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
694	JL.SUNGAI KOMERING	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
695	JL.SUNGAI MAHAKAM	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
696	JL.SUNGAI SAMBAS	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
697	JL.SUNGAI SAMBAS	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
698	JL.SURYA UTAMA	JEBRES	JAGALAN	C
699	JL.SURYA UTAMA	JEBRES	JEBRES	C
700	JL.SURYO	JEBRES	JAGALAN	C
701	JL.SURYO	JEBRES	JEBRES	C
702	JL.SURYO	JEBRES	PURWODININGRATAN	C
703	JL.SURYO PRANOTO	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
704	JL.SUTOWIJOYO	LAWEYAN	PENUMPING	C
705	JL.TAGORE	BANJARSARI	GILINGAN	C
706	JL.TAMBORA	JEBRES	MOJOSONGO	C
707	JL.TANGKUBAN PERAHU	JEBRES	MOJOSONGO	C
708	JL.TANJUNG	LAWEYAN	KARANGASEM	C
709	JL.TARUMA NEGARA	BANJARSARI	BANYUANYAR	C
710	JL.TELASIH	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
711	JL.TELASIH	LAWEYAN	PENUMPING	C
712	JL.TERNATE	BANJARSARI	SETABELAN	C
713	JL.TIRTOSARI	LAWEYAN	PAJANG	C
714	JL.TIRTOSARI	LAWEYAN	SRIWEDARI	C
715	JL.TIRTOTEJO	LAWEYAN	PAJANG	C
716	JL.TIRTOTEJO	LAWEYAN	SONDAKAN	C
717	JL.TIRTOYOSO	BANJARSARI	MANAHAN	C
718	JL.TODIPAN	LAWEYAN	PURWOSARI	C
719	JL.TRANSITO	LAWEYAN	PAJANG	C
720	JL.TRANSITO	LAWEYAN	SONDAKAN	C
721	JL.TRISULA	PASARKLIWON	KAUMAN	C
722	JL.TRISULA	SERENGAN	TIPES	C
723	JL.TRUNTUM	LAWEYAN	SONDAKAN	C
724	JL.TUNGGULSARI	LAWEYAN	PAJANG	C
725	JL.WIDORO KANDANG	SERENGAN	KRATONAN	C
726	JL.WIJAYA KUSUMA	LAWEYAN	PENUMPING	C
727	JL.WIJAYA KUSUMA	PASARKLIWON	KAUMAN	C
728	JL.WIJAYA KUSUMA	SERENGAN	TIPES	C
729	JL.WIROTAMTOMO	SERENGAN	JAYENGAN	C
730	JL.WUNI	LAWEYAN	KARANGASEM	C
731	JL.YOSOROTO	LAWEYAN	PURWOSARI	C
732	JL.YUDISTIRA	SERENGAN	SERENGAN	C
733	KOMP.BETENG TRADE CENTER	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
734	KOMP.PERUM GRIYA BATARA	BANJARSARI	KADIPIRO	C
735	KOMP.PSR. GEDE	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
736	KOMP.PSR. KLECO	BANJARSARI	KADIPIRO	C
737	KOMP.PSR. LEGI	JEBRES	TEGALHARJO	C
738	KOMP.PSR. NONGKO	BANJARSARI	MANGKUBUMEN	C
739	KOMP.SRIWEDARI	LAWEYAN	SRIWEDARI	C
740	KP.DEMANGAN	PASARKLIWON	KEDUNGLUMBU	C
741	KP.DEMANGAN	PASARKLIWON	SANGKRAH	C
742	KP.JAGALAN	JEBRES	JAGALAN	C
743	KP.JAGALAN	JEBRES	MOJOSONGO	C
744	KP.JAGALAN	JEBRES	PURWODININGRATAN	C
745	KP.JAGALAN	LAWEYAN	BUMI	C
746	KP.KEPATIHAN	JEBRES	KEPATIHAN KULON	C
747	KP.KEPATIHAN	JEBRES	KEPATIHAN WETAN	C
748	KP.NAYU	BANJARSARI	KADIPIRO	C
749	KP.NAYU	BANJARSARI	NUSUKAN	C
750	JL.AGUNG TIMUR	JEBRES	MOJOSONGO	D

<b>NO.</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>ZONA</b>
751	JL.APEL	LAWEYAN	JAJAR	D
752	JL.AWAN	JEBRES	JEBRES	D
753	JL.DWOROWATI	SERENGAN	KRATONAN	D
754	JL.GREMET	BANJARSARI	MANAHAN	D
755	JL.KANGGOTAN	JEBRES	PURWODININGRATAN	D
756	JL.KAWUNG	LAWEYAN	SONDAKAN	D
757	JL.KEDUNG TUNGKUL	JEBRES	MOJOSONGO	D
758	JL.MATOA RAYA	LAWEYAN	KARANGASEM	D
759	JL.PANDU DEWANATA	SERENGAN	JAYENGAN	D
760	JL.PULANGGENI	SERENGAN	TIPES	D
761	JL.RAMBUTAN	LAWEYAN	KARANGASEM	D
762	JL.SATRIO WIBOWO	LAWEYAN	PURWOSARI	D
763	JL.SUNGAI SERANG	PASARKLIWON	MOJO	D

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET  
BERUPA PEMAKAIAN TANAH UNTUK  
PEMASANGAN REKLAME

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

- a. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Papan/Billboard ditetapkan sebagai berikut:

No.	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas	Jangka Waktu Penyelenggaraan	NSR (Rp)
1.	ZONA A	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	4.400.000,00
2.	ZONA B	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.800.000,00
3.	ZONA C	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	2.200.000,00
4.	ZONA D	1 m <sup>2</sup>	1 Tahun	1.200.000,00

- b. Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Videotron, Megatron, Light Emitting Diode (LED) ditetapkan Rp41.000.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (empat puluh satu juta rupiah per meter persegi) atau Rp 130.000,00/m<sup>2</sup>/hari.
- c. NSR videotron milik pemerintah daerah adalah sebesar nilai sewa reklame.
- d. Ketentuan sewa reklame videotron pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
- 1) dasar pengenaan nilai sewa dihitung berdasarkan jumlah slot.
  - 2) videotron berukuran 4 meter x 6 meter dengan minimal sewa selama 7 hari dan mendapatkan 60 slot;
  - 3) videotron berukuran 3 meter x 1,5 meter dengan minimal sewa selama 7 hari mendapatkan 30 slot.
  - 4) apabila ada penambahan slot, maka biaya sewa dikalikan jumlah persentase penambahan slot.
  - 5) jam tayang reklame videotron milik pemerintah daerah selama 18 (delapan belas) jam per hari dimulai Pukul 06.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- e. Hasil perhitungan NSR untuk jenis Reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut:
1. Reklame Indoor:  
Rp600.000,00 m<sup>2</sup>/tahun (enam ratus ribu ratus ribu rupiah per meter persegi per tahun)
  2. Reklame Spanduk/banner/layar toko:
    - a. Rp40.000,00/m<sup>2</sup> (empat puluh ribu ruiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan untuk bahan kain.
    - b. Rp100.000,00/m<sup>2</sup> (seratus ribu rupiah per meter persegi) setiap 1 (satu) minggu penayangan untuk bahan MMT.

3. Reklame umbul-umbul  
Rp40.000,00/m (empat puluh ribu rupiah per meter) setiap 1 (satu) minggu penyelenggaraan.
4. Reklame Melekat (Stiker):
  - Rp500.000,00/m<sup>2</sup>/bulan (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi per bulan paling sedikit 1 (satu) bulan penyelenggaraan.
  - Rp3.000.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (tiga juta rupiah) per meter persegi per tahun.
5. Reklame Selebaran:  
Rp1.000,00/lembar (seribu rupiah per lembar).
6. Reklame Berjalan/Kendaraan:
  - Rp300.000,00/m<sup>2</sup>/bulan (tiga ratus ribu rupiah) per meter persegi per bulan.
  - Rp2.500.000,00/m<sup>2</sup>/tahun (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi per tahun.
7. Reklame Udara:  
Rp4.000.000,00/minggu (empat juta rupiah per minggu) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
8. Reklame Apung:  
Rp2.000.000,00/30 detik (dua juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
9. Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya:  
Rp10.000,00/30 detik (sepuluh ribu rupiah per tiga puluh detik), bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
10. Reklame Peragaan:  
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA  
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN  
RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET  
BERUPA PEMAKAIAN TANAH UNTUK  
PEMASANGAN REKLAME

FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME

Nomor :  
Lamp :  
Perihal :  
Surakarta, .....  
K e p a d a:  
Yth. Kepala Badan Pendapatan  
Daerah Kota Surakarta  
di  
SURAKARTA  
: Pengurangan Pajak  
Reklame/Pengurangan/  
Penghapusan Sanksi  
Administrasi

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik/Pengelola : .....  
Alamat : .....  
NPWPD : .....  
Lokasi Reklame : .....  
Judul : .....  
Ukuran Reklame : .....  
Jumlah Reklame : .....  
1. Ketetapan Pajak : Rp.....  
2. Sanksi Administratif : Rp.....

Berdasarkan hal tersebut kami mengajukan pengurangan  
pajak reklame/pengurangan/penghapusan sanksi administratif  
dengan alasan:

.....  
.....

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya  
disampaikan terima kasih.

Pemohon

(.....)

WALI KOTA SURAKARTA

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA